

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan paradigma pembangunan menunjukkan adanya pergeseran dari model yang bersifat sentralistik menuju pendekatan yang lebih partisipatif. Pendekatan pembangunan partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Terkait pembangunan desa di Indonesia, partisipasi masyarakat menjadi salah satu elemen penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Desa sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan. Salah satu forum yang menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam proses tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Forum ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, aspirasi, serta usulan program pembangunan yang akan dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah desa.

Praktik partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak dapat

dilepaskan dari keterlibatan berbagai kelompok sosial, termasuk perempuan. Perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa, terutama dalam pengelolaan rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta kegiatan ekonomi produktif skala kecil. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan menjadi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil dan seimbang.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam forum pembangunan desa masih menghadapi berbagai hambatan. Budaya patriarki yang masih kuat di banyak daerah seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih terbatas dalam ruang publik. Perempuan juga sering menghadapi beban peran ganda, yaitu menjalankan peran domestik dalam rumah tangga sekaligus peran sosial di masyarakat. Kondisi ini menyebabkan perempuan memiliki keterbatasan waktu dan kesempatan untuk terlibat aktif dalam forum pengambilan keputusan. Selain itu, rendahnya tingkat kepercayaan diri serta minimnya representasi perempuan dalam struktur pemerintahan desa juga menjadi faktor yang membatasi ruang partisipasi mereka.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrenbang desa sering kali masih bersifat simbolis. Perempuan memang hadir dalam forum musyawarah, namun keterlibatan mereka dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan masih relatif terbatas. Diskusi dalam forum tersebut umumnya didominasi oleh laki-laki, sehingga aspirasi perempuan tidak selalu terakomodasi secara optimal dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.

Meskipun demikian, terdapat beberapa desa yang menunjukkan dinamika berbeda dalam partisipasi perempuan. Salah satu contohnya adalah Desa Ampelsari di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Desa ini memiliki karakteristik yang menarik karena menunjukkan tingkat keterlibatan perempuan yang relatif tinggi dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Data menunjukkan bahwa perempuan hadir dalam forum Musrenbangdes dalam jumlah yang cukup signifikan, bahkan mencapai sekitar 38 persen dari total peserta. Selain itu, perempuan juga menempati sejumlah posisi strategis dalam pemerintahan desa serta aktif dalam berbagai organisasi masyarakat desa.

Fenomena tersebut menjadi semakin menarik karena Desa Ampelsari juga dipimpin oleh seorang kepala desa perempuan yang mendorong penerapan prinsip pembangunan partisipatif. Kehadiran kepemimpinan perempuan ini dinilai turut membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan desa untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Berbagai usulan yang berasal dari kelompok perempuan, seperti program kesehatan keluarga, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, serta penguatan organisasi perempuan, bahkan telah masuk dalam dokumen rencana kerja pemerintah desa.

Namun demikian, meskipun partisipasi perempuan di Desa Ampelsari menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, masih terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas partisipasi tersebut. Beberapa perempuan masih cenderung pasif dalam forum musyawarah yang lebih besar, dan hanya sebagian kecil yang aktif menyampaikan pendapat secara langsung. Selain itu, faktor budaya, peran domestik, serta keterbatasan akses terhadap posisi strategis

di lembaga desa masih menjadi hambatan yang mempengaruhi keterlibatan perempuan secara lebih luas.

Berdasarkan kondisi tersebut, Desa Ampelsari menjadi lokus yang relevan untuk diteliti guna memahami bagaimana dinamika partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan desa secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Desa Ampelsari, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat keterlibatan tersebut. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis kedalaman keterlibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan serta efektivitas program-program pemberdayaan yang telah diimplementasikan di desa tersebut.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa, masyarakat lokal, maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan partisipasi perempuan yang lebih substantif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong terwujudnya tata kelola pembangunan desa yang lebih inklusif, responsif gender, dan berkelanjutan di Desa Ampelsari.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

- 1 Bagaimana partisipasi perempuan dalam perencanaan di tingkat desa (studi kasus Musrenbang Desa di Desa Ampelsari) menurut Arnstein?
- 2 Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam

perencanaan pembangunan di Desa Ampelsari?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis partisipasi perempuan dalam perencanaan di tingkat desa (studi kasus Musrenbang Desa di Desa Ampelsari) menurut tangga partisipasi Arnstein.
2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Desa Ampelsari.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pembaca mengenai kontribusi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa khususnya dalam Musrenbang Desa di Desa Ampelsari. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kontribusi perempuan dalam perencanaan desa. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat desa sebagai landasan untuk meningkatkan partisipasi perempuan, membangun pembangunan yang lebih komprehensif serta penguatan perempuan dalam pengambilan keputusan saat kegiatan Musrenbang Desa. Dengan demikian, suara dan kebutuhan perempuan akan lebih terakomodasi dengan baik dalam perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini juga memberikan informasi kepada pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan, peningkatan kualitas pembangunan, serta sebagai evaluasi program dan kegiatan. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang lebih berkelanjutan dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan yang merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pembaca mengenai kontribusi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa khususnya dalam Musrenbang Desa di Desa Ampelsari. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kontribusi perempuan dalam perencanaan desa.

1.5 Kerangka Teori

1. Penelitian Terdahulu

Referensi berupa teori-teori atau temuan-temuan dalam hasil penelitian sebelumnya merupakan hal penting dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini adalah salah satu sumber data yang dapat digunakan sebagai referensi. Meskipun penelitian sebelumnya memiliki kesamaan, penelitian ini tetap memiliki ide, dimensi, dan penjelasan yang berbeda. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam skripsi ini berkaitan dengan kontribusi dan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun forum perencanaan sejenis.

Penelitian pertama dilakukan oleh Hayatun Nufus (2020) yang berjudul *Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*

(Studi Kasus: Gampong Ulee Nyeu Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018–2019). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi perempuan dalam forum Musrenbang desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrenbang desa masih menghadapi berbagai kendala, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kepercayaan diri perempuan dan keterbatasan kapasitas dalam menyampaikan aspirasi, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan masih kuatnya budaya patriarki, dominasi elit laki-laki dalam forum pengambilan keputusan, serta keterbatasan akses informasi mengenai proses perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun perempuan telah dilibatkan dalam forum Musrenbang, partisipasi tersebut seringkali masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembangunan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Anggita Permana Putri (2009) dengan judul *Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Deskriptif Kualitatif Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Laweyan Kota Surakarta)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada bagaimana perempuan berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan di tingkat desa serta faktor yang mempengaruhi keterlibatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrenbang desa telah mulai meningkat, namun

masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Hambatan tersebut antara lain rendahnya representasi perempuan dalam struktur kelembagaan desa, kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi secara aktif, serta adanya persepsi bahwa forum perencanaan pembangunan lebih didominasi oleh laki-laki. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan organisasi perempuan di tingkat desa dapat menjadi sarana penting dalam mendorong partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan.

Penelitian ketiga adalah penelitian Sri Ekawati (2010) berjudul “Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta). Penelitian ini menyoroti bagaimana perempuan terlibat dalam berbagai tahapan pembangunan desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan desa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kebijakan dan kelembagaan desa, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat pedesaan menjadi salah satu faktor yang membatasi ruang partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan kelompok atau organisasi perempuan dapat meningkatkan kapasitas perempuan untuk terlibat dalam pembangunan desa serta memperkuat posisi mereka dalam forum perencanaan

pembangunan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Nur Aini Rizki (2016) yang berjudul Musrenbang Perempuan sebagai Arena Perjuangan Kesenjangan Perempuan di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini membahas mengenai Musrenbang perempuan sebagai ruang partisipasi politik bagi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis bagaimana forum Musrenbang perempuan menjadi sarana bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan mereka dalam pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Musrenbang perempuan memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya dalam menyuarakan kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan. Forum tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam memahami proses perencanaan pembangunan serta memperkuat posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari faktor sosial budaya, kelembagaan, maupun keterbatasan akses perempuan terhadap proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan forum atau mekanisme khusus yang memberikan ruang bagi perempuan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses

pembangunan.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Pertama, penelitian ini berfokus pada partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa melalui forum Musrenbang di Desa Ampelsari, Kabupaten Kebumen. Kedua, penelitian ini dilakukan dalam konteks desa yang memiliki kepemimpinan kepala desa perempuan, yang menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong terbukanya ruang partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan. Ketiga, di Desa Ampelsari terdapat inovasi kelembagaan berupa forum Musyawarah Dusun (Musdus) Perempuan yang dipanitiai oleh Wani Lemper (Wanita Melek Perencanaan) yang secara khusus menjadi ruang bagi perempuan untuk menghimpun aspirasi dan merumuskan usulan pembangunan sebelum dibawa ke forum Musrenbang desa. Kondisi tersebut memberikan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa dapat berkembang melalui dukungan kepemimpinan lokal serta inovasi kelembagaan yang inklusif.

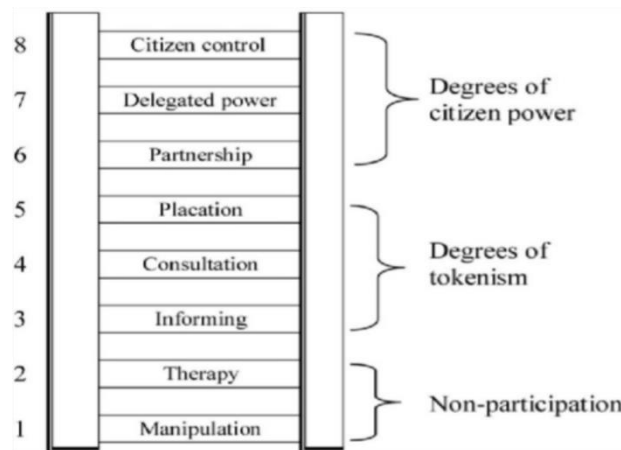
2. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu konsep penting dalam kajian ilmu politik karena berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi politik menunjukkan sejauh mana individu atau kelompok masyarakat terlibat dalam aktivitas politik yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan maupun proses pemerintahan.

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pemimpin, menghadiri pertemuan politik, menyampaikan aspirasi, maupun terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik. Bentuk keterlibatan tersebut dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai forum pengambilan keputusan.

Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip penting dalam proses perencanaan pembangunan yang demokratis. Keterlibatan masyarakat memungkinkan aspirasi berbagai kelompok sosial, termasuk kelompok yang selama ini kurang terwakili seperti perempuan, dapat disampaikan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dari kehadiran dalam suatu forum, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta mempengaruhi hasil keputusan yang diambil.

Dalam penelitian mengenai partisipasi masyarakat, salah satu konsep yang banyak digunakan untuk melihat tingkat partisipasi adalah Tangga Partisipasi Masyarakat (*A Ladder of Citizen Participation*) yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein pada tahun 1969. Konsep ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki berbagai tingkatan yang menunjukkan seberapa besar kekuasaan yang dimiliki masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.



Gambar 1.1 Tangga Partisipasi Politik (*A Ladder of Citizen Participation*)
 Sumber: Diolah dari Arnstein (1969)

Arnstein mengembangkan delapan tingkat partisipasi yang digambarkan dalam bentuk tangga partisipasi. Delapan tingkat tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama yaitu *non-participation*, *tokenism*, dan *citizen power*. Konsep ini digunakan untuk memahami apakah keterlibatan masyarakat hanya bersifat simbolik atau benar-benar memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

- a. Kategori pertama adalah *non-participation*, yang terdiri dari dua tingkat yaitu *manipulation* dan *therapy*. Pada tingkat ini masyarakat sebenarnya tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara nyata dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat hanya digunakan sebagai alat legitimasi bagi pihak yang memiliki kekuasaan. Masyarakat hanya dijadikan objek dari program yang telah dirancang oleh pemerintah atau pihak pengambil kebijakan.
- b. Kategori kedua adalah *tokenism*, yang terdiri dari tiga tingkat yaitu *informing*, *consultation*, dan *placation*. Pada tingkat ini masyarakat mulai

diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi. Namun, kekuasaan dalam pengambilan keputusan tetap berada pada pihak pemerintah atau elite yang berwenang. Dengan kata lain, masyarakat dapat memberikan masukan, tetapi tidak memiliki jaminan bahwa pendapat tersebut akan mempengaruhi keputusan akhir.

- c. Kategori tertinggi dalam tangga partisipasi Arnstein adalah *citizen power*, yang terdiri dari tiga tingkat yaitu *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*. Pada tingkat ini masyarakat memiliki posisi yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi bahkan menentukan keputusan yang diambil. Pada tingkat *partnership*, masyarakat dapat melakukan negosiasi dengan pemerintah dalam proses perencanaan kebijakan. Pada tingkat *delegated power*, masyarakat memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Sementara pada tingkat tertinggi yaitu *citizen control*, masyarakat memiliki kontrol penuh terhadap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Dalam penelitian ini, konsep tangga partisipasi Arnstein digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat tingkat partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Ampelsari. Melalui kerangka ini, penelitian dapat mengidentifikasi apakah keterlibatan perempuan dalam forum Musrenbangdes hanya bersifat simbolik atau telah mencapai tingkat partisipasi yang lebih substansial dalam proses perencanaan pembangunan desa.

3. Teori Gender

Gender merupakan konsep yang berbeda dengan jenis kelamin biologis. Jika jenis kelamin bersifat kodrati dan tidak dapat diubah, maka gender merupakan konstruksi sosial dan budaya yang membentuk peran, perilaku, serta ekspektasi yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dengan demikian, gender tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya dalam suatu masyarakat. Dalam kajian pembangunan, konsep gender menjadi penting karena perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan dapat memengaruhi akses serta tingkat keterlibatan mereka dalam ruang publik, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Judith Butler (1990) melalui konsep *gender performativity* menjelaskan bahwa gender bukanlah identitas yang bersifat tetap, melainkan sesuatu yang terus diproduksi melalui tindakan, perilaku, dan norma sosial yang berulang. Dengan kata lain, peran yang dianggap “feminin” atau “maskulin” terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarkal, konstruksi sosial tersebut sering menempatkan perempuan pada ranah domestik, sementara laki-laki lebih dominan dalam ranah publik. Kondisi ini menyebabkan perempuan sering dianggap kurang memiliki kapasitas atau legitimasi untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik, termasuk dalam forum musyawarah pembangunan desa.

Dalam kajian gender dan pembangunan, Caroline Moser (1993)

mengemukakan konsep *triple role of women*, yaitu peran reproduktif, produktif, dan peran komunitas. Peran reproduktif berkaitan dengan aktivitas domestik seperti mengurus rumah tangga dan merawat anak. Peran produktif merujuk pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan, sedangkan peran komunitas berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial di masyarakat seperti kegiatan PKK, Posyandu, maupun organisasi kemasyarakatan di tingkat desa. Ketiga peran tersebut sering dijalankan secara bersamaan oleh perempuan, sehingga menimbulkan beban peran yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Kondisi ini sering menjadi salah satu faktor yang membatasi keterlibatan perempuan dalam kegiatan publik, termasuk dalam forum perencanaan pembangunan desa seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Sementara itu, Naila Kabeer (1999) menjelaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan berkaitan erat dengan konsep pemberdayaan perempuan (*empowerment*). Menurut Kabeer, pemberdayaan perempuan dapat dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu *resources* (sumber daya), *agency* (kemampuan bertindak), dan *achievements* (hasil atau pencapaian). Perempuan dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses pembangunan apabila mereka memiliki akses terhadap sumber daya seperti informasi, pendidikan, serta dukungan sosial. Selain itu, perempuan juga perlu memiliki agensi, yaitu kemampuan dan keberanian untuk menyampaikan pendapat serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi tersebut kemudian dapat menghasilkan pencapaian nyata apabila aspirasi perempuan diakomodasi dalam kebijakan atau

program pembangunan.

Berdasarkan perspektif tersebut, dapat dipahami bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam forum Musrenbang tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kesempatan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada ranah domestik, beban peran ganda yang mereka jalani, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya yang mendukung partisipasi mereka dalam ruang publik. Dalam konteks penelitian ini, teori gender digunakan untuk menganalisis bagaimana norma sosial, pembagian peran dalam masyarakat, serta akses perempuan terhadap sumber daya memengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Ampelsari. Selain itu, teori ini juga membantu melihat apakah keberadaan kepala desa perempuan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan desa.

4. Teori Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan salah satu elemen krusial dalam setiap proses pembangunan, termasuk pembangunan di tingkat desa. Secara umum, perencanaan dapat dipahami sebagai proses yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai serta langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Melalui perencanaan yang baik, pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pentingnya perencanaan dalam pembangunan juga ditegaskan oleh Dr. Nur Hidayat Sardini, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Diponegoro, yang menyatakan bahwa *‘sekitar 50% keberhasilan pelaksanaan suatu program telah tercapai ketika perencanaannya disusun dengan baik dan matang.’* Pernyataan ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan implementasi program pembangunan. Dengan demikian, perencanaan yang matang menjadi fondasi utama dalam menentukan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Pembangunan desa menuntut proses perencanaan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendekatan perencanaan partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor yang turut menentukan arah dan prioritas pembangunan di wilayahnya.

Salah satu tokoh yang mengembangkan konsep perencanaan partisipatif adalah Robert Chambers (1997). Chambers menekankan pentingnya membalikkan “piramida kekuasaan” dalam pembangunan dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan. Menurutnya, masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam memahami permasalahan yang dihadapi sehingga keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Perencanaan pembangunan partisipatif memiliki beberapa prinsip utama,

yaitu:

1. Inklusivitas, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh kelompok masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan, termasuk kelompok yang sering terpinggirkan seperti perempuan dan kelompok rentan lainnya.
2. Transparansi, yaitu keterbukaan informasi dalam proses perencanaan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami proses pengambilan keputusan.
3. Akuntabilitas, yaitu adanya pertanggungjawaban dari pihak pengambil kebijakan kepada masyarakat terhadap program pembangunan yang dirumuskan.
4. Pemberdayaan masyarakat, yaitu proses yang tidak hanya melibatkan masyarakat secara formal, tetapi juga meningkatkan kapasitas mereka dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi pembangunan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan kualitas keputusan pembangunan karena proses perencanaan didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap program pembangunan sehingga mendukung keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Pendekatan perencanaan partisipatif juga sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan di Indonesia yang menggunakan pendekatan *bottom-up*, di mana aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan. Salah satu forum yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Melalui forum ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, serta merumuskan usulan program yang akan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan.

Dalam kerangka perencanaan partisipatif, keterlibatan seluruh kelompok masyarakat menjadi hal yang penting agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan secara inklusif. Partisipasi masyarakat tidak hanya dipahami sebagai kehadiran dalam forum perencanaan, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam proses diskusi, penyampaian aspirasi, serta kontribusi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai kelompok sosial, termasuk perempuan, menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan mampu merepresentasikan kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Dalam penelitian ini, teori perencanaan partisipatif digunakan untuk menganalisis sejauh mana partisipasi perempuan dalam forum Musrenbang Desa Ampelsari terlaksana. Analisis tidak hanya melihat keberadaan perempuan dalam forum tersebut secara kuantitatif, tetapi juga menilai kualitas partisipasi mereka, seperti kemampuan menyampaikan aspirasi, keterlibatan dalam proses diskusi, serta pengaruh usulan yang disampaikan terhadap keputusan pembangunan desa. Dengan demikian, teori perencanaan partisipatif digunakan untuk memahami bagaimana proses perencanaan pembangunan desa dapat berjalan secara lebih inklusif dan berkeadilan gender.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Dalam operasionalisasi konsep, peneliti menggunakan teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu teori partisipasi politik, teori gender dan teori pembangunan. Ketiga teori tersebut sangat berkaitan antara satu sama lain karena akan membahas tentang partisipasi perempuan dalam Musrenbang Desa.

Tabel 1.1 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Definisi	Indikator Konsep
Teori Partisipasi Politik (Arnstein, 1969).	Partisipasi politik merupakan keterlibatan individu atau kelompok dalam aktivitas politik untuk memengaruhi keputusan kebijakan pemerintah. Sementara itu, partisipasi perempuan merupakan keterlibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik melalui tangga partisipasi dari <i>non-participation</i> , <i>tokenism</i> , hingga <i>citizen power</i> (<i>partnership</i>).	a. Kehadiran perempuan dalam musrenbang: Menggambarkan keterlibatan perempuan secara fisik dalam forum Musrenbang sebagai peserta rapat atau perwakilan kelompok masyarakat. Kehadiran ini menunjukkan adanya kesempatan bagi perempuan untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. b. Penyampaian aspirasi atau pendapat: Menggambarkan aktivitas perempuan dalam menyampaikan ide, kebutuhan, atau permasalahan yang dialami masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan perempuan, dalam forum Musrenbang. c. Keterlibatan dalam diskusi atau musyawarah: Menunjukkan sejauh mana perempuan terlibat aktif dalam proses diskusi, memberikan tanggapan, maupun ikut mempertimbangkan berbagai usulan pembangunan yang dibahas dalam forum Musrenbang. d. Pengaruh terhadap keputusan

		pembangunan: Menggambarkan apakah aspirasi atau usulan yang disampaikan oleh perempuan dipertimbangkan dan berpengaruh terhadap keputusan akhir dalam perencanaan pembangunan desa.
Teori Gender (Moser, 1993)	Gender merupakan konstruksi sosial dan budaya yang membedakan peran, tanggung jawab, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan ini dibentuk oleh norma dan nilai sosial yang mempengaruhi posisi serta peran perempuan dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam proses pembangunan.	a. Peran produktif: Menggambarkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi atau pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, baik di sektor formal maupun informal. b. Peran sosial atau kemasyarakatan: Menggambarkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial masyarakat seperti organisasi perempuan, kegiatan desa, ataupun kegiatan kemasyarakatan lainnya.
Teori Perencanaan Partisipatif (Chambers, 1997).	Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan, menyampaikan aspirasi, serta merumuskan usulan pembangunan sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan masyarakat.	a. Keterlibatan perempuan dalam penyusunan usulan pembangunan: Menggambarkan partisipasi perempuan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyampaikan usulan program pembangunan yang dibahas dalam Musrenbang. b. Kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam forum Musrenbang: Menunjukkan sejauh mana perempuan diberi ruang, kesempatan, dan akses untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa melalui forum Musrenbang. c. Respons pemerintah desa

		terhadap aspirasi perempuan: Menggambarkan bagaimana pemerintah desa menanggapi, mempertimbangkan, dan mengakomodasi aspirasi yang disampaikan oleh perempuan dalam proses perencanaan pembangunan.
--	--	---

1.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan dinamika partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes Desa Ampelsari sebagai proses kausal yang dipengaruhi oleh hambatan struktural-kultural dan faktor pendorong kontekstual. Hambatan seperti budaya patriarki, beban *triple role* menurut Moser (1993), serta minimnya posisi strategis perempuan menyebabkan partisipasi awal cenderung bersifat *tokenism*, di mana kehadiran perempuan masih bersifat simbolis tanpa pengaruh substansial terhadap pembangunan yang inklusif dan responsif gender.

KERANGKA BERPIKIR SKRIPSI: PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MUSRENBANGDES DESA AMPELSARI



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

Di sisi lain, faktor *intervening* berupa kepemimpinan kepala desa perempuan,

inovasi Musdus Perempuan melalui Wani Lemper (Wanita Melek Perencanaan), serta prinsip perencanaan partisipatif Chambers, mendorong pergeseran menuju tingkat *partnership* dalam Tangga Partisipasi Arnstein (1969), yang ditopang oleh analisis *agency* Kabeer. Bagan ini menunjukkan alur di mana hambatan (kotak merah muda) berinteraksi dengan faktor positif (kotak hijau), menghasilkan *outcome* partisipasi substantif berupa akomodasi usulan perempuan (seperti program kesehatan dan ekonomi rumah tangga) dalam RKPDes. Kerangka ini menjawab rumusan masalah dengan mengukur tingkat partisipasi (RQ1) melalui teori Arnstein dan mengidentifikasi faktor-faktor pengaruh (RQ2) secara sistematis.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif untuk menganalisis partisipasi perempuan dalam Musrenbang Desa karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan holistik. Metode kualitatif, menurut Lexy J. Moleong (2005), bertujuan untuk menggali pengalaman subjektif, tingkah laku, dan motivasi individu dalam konteks tertentu, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang kaya dan kontekstual. Selain itu, Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data dari objek yang alamiah, bukan eksperimen.

Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat melakukan wawancara

mendalam dan observasi partisipatif yang memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan data serta memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan berdasarkan respons informan. Hal ini sangat penting untuk mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi, serta untuk memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi keterlibatan mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika partisipasi perempuan dalam Musrenbang dan memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat lokal.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen yang memiliki kantor desa beralamat di Jalan Pelautan RT 04 RW 02 Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen 54382. Lokasi tersebut digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini karena fokus dari penelitian ini yaitu menganalisis partisipasi perempuan dalam Musrenbang Desa. Selain itu fenomena yang terjadi dan objek penelitian menarik untuk diteliti secara detail.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu, kelompok, atau objek yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah penelitian. Pemilihan subjek dilakukan karena mereka memiliki karakteristik, fenomena, atau atribut tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian dan mampu memberikan data atau informasi terkait fakta yang

terjadi. Menurut Sugiyono, subjek penelitian adalah pihak atau hal yang dijadikan sasaran untuk mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2016). Subjek penelitian dapat diartikan sebagai sumber data atau informasi untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan dan mengungkap fakta-fakta yang terjadi.

Penelitian ini memfokuskan analisis akan diarahkan pada partisipasi perempuan dalam Musrenbang, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan perempuan, memahami pengalaman dan persepsi mereka selama proses Musrenbang, serta mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam berpartisipasi. Target *stakeholder* dalam penelitian ini adalah perempuan anggota masyarakat, kepala desa beserta jajarannya, anggota lembaga desa, serta beberapa tokoh masyarakat. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi partisipasi perempuan, serta mencari solusi untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan di tingkat lokal. Narasumber akan diminta untuk memberikan informasi tentang kondisi partisipasi perempuan saat Musrenbang yang dipimpin oleh kepala desa perempuan, bagaimana proses Musrenbang di desa tersebut, dan apakah isu perempuan sudah diangkat dengan baik.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya, yang memungkinkan peneliti untuk melakukan

pengamatan dan mencatat jawaban dari objek penelitian secara akurat (Supono, 2013). Pengumpulan data primer ini dilakukan melalui berbagai metode, termasuk wawancara langsung, survei, dan dokumentasi, sehingga hasil yang didapatkan dapat mencerminkan keadaan nyata yang terjadi di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber serta dokumentasi visual berupa foto-foto yang diambil selama kegiatan pembuatan kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam mengenai partisipasi perempuan dalam Musrenbang.

Di sisi lain, sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung (Supono, 2013). Jenis dan bentuk sumber data sekunder ini bervariasi tergantung pada metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup berbagai sumber seperti buku, dokumen resmi, arsip dari Kantor Desa Ampelsari, jurnal akademik, artikel terkait, serta informasi yang tersedia di situs web Desa Ampelsari. Selain itu, media cetak dan sumber online lainnya juga dimanfaatkan untuk melengkapi dan memperkaya analisis. Penggunaan kedua jenis data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena partisipasi perempuan dalam Musrenbang dan mendukung validitas temuan penelitian.

1.8.5 Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, perempuan yang berpartisipasi dalam Musrenbang Desa, perempuan yang tidak berpartisipasi dalam Musrenbang Desa, Ketua atau Anggota BPD, tokoh masyarakat atau tokoh

perempuan, serta pendamping desa atau fasilitator Musrenbang Desa.

Teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja, di mana peneliti memilih individu atau unit sesuai kriteria tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Metode ini juga dikenal dengan sebutan judgemental sampling atau *selective sampling*.

Metode ini sangat berguna dalam situasi di mana populasi yang diteliti kecil atau ketika peneliti ingin mengeksplorasi subkelompok tertentu dalam populasi. Alasan penulis memilih metode ini karena penulis telah menetapkan terlebih dahulu kriteria informan atau narasumber yang diasumsikan dapat memahami topik pertanyaan dengan baik serta data yang dibutuhkan dalam penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik penelitian tersebut merupakan instrumen yang paling relevan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Penjelasan tentang ketiga teknik pengumpulan data tersebut dijabarkan seperti dibawah ini :

a. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan narasumber secara langsung (*face to face interview*). Dengan melakukan hal ini akan didapatkan data yang akurat dan aktual sesuai dengan fenomena yang

terjadi. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terkait dengan topik partisipasi perempuan dalam musrenbang di Desa Ampelsari. Hasil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menghasilkan pendapat dan pandangan dari informan atau narasumber.

b. Dokumentasi.

Sugiyono dalam bukunya Memahami Penelitian Kualitatif (2005) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen tertulis, seperti catatan, laporan, arsip, gambar, atau hasil karya lainnya yang relevan. Dokumen tersebut berfungsi sebagai sumber informasi, baik sebagai data utama maupun pendukung, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa studi pustaka, foto bersama narasumber atau informan ketika memberikan informasi, foto kegiatan Musrenbang Desa, dan data-data dokumen dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen serta Kantor Kepala Desa Ampelsari.

c. Dokumentasi.

Sugiyono dalam bukunya Memahami Penelitian Kualitatif (2005) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen tertulis, seperti catatan, laporan, arsip, gambar, atau hasil karya lainnya yang relevan. Dokumen tersebut berfungsi sebagai sumber informasi, baik sebagai data utama maupun pendukung, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian

ini berupa studi pustaka, foto bersama narasumber atau informan ketika memberikan informasi, foto kegiatan Musrenbang Desa, dan data-data dokumen dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen serta Kantor Kepala Desa Ampelsari.

1.8.7 Analisis Data dan Interpretasi

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari serta menyusun data dengan sistematis yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang nantinya data tersebut dikelompokkan ke beberapa kategori, menjabarkan dalam komponen-komponen, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih hal yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan dengan tujuan mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2018). Pelaksanaan analisis data dilakukan saat proses pengumpulan data dan dilakukan secara intensif. Dalam proses pengumpulan data diperlukan ketepatan serta keakuratan meskipun akan ditemui informasi yang berbeda-beda yang disebabkan oleh sumber informasi yang berbeda.

Data penelitian kualitatif dapat diperoleh dari berbagai sumber melalui bermacam- macam teknik pengumpulan data yang dilakukan secara rutin sehingga variasi data menjadi tinggi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Matthew B. Miles and A. Michael Huberman. Model analisis data ini memiliki komponen utama, yaitu :

a. Pengumpulan Data

Tahap awal dari metode dalam melakukan analisis data adalah pengumpulan data. Dalam tahap ini data kualitatif berupa data hasil wawancara dan observasi yang

diperoleh dari narasumber atau informan yang dihimpun dan dikumpulkan. Setelah data-data itu dikumpulkan akan dilakukan penyeleksian dan dilanjutkan tahap berikutnya yaitu reduksi data.

b. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, peneliti akan menyusun ringkasan terkait poin-poin utama yang relevan dengan topik penelitian. Fokus diarahkan pada aspek penting yang mendukung topik, sekaligus mengidentifikasi tema dan pola yang dapat memberikan gambaran lebih jelas. Langkah ini juga bertujuan untuk mempermudah proses pengumpulan data berikutnya. Reduksi data dapat dipandang sebagai aktivitas berpikir kritis yang memerlukan kecerdasan serta wawasan yang mendalam. Proses ini akan dilakukan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Penyajian Data

Tahap terakhir adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa narasi, grafik, tabel, *flowchart*, dan lain sebagainya. Selain itu, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori, diagram, atau format serupa. Namun, dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data yang paling umum digunakan adalah teks naratif. Dengan penyajian data dalam berbagai bentuk tersebut, informasi menjadi lebih terstruktur dan terorganisasi sehingga lebih mudah dipahami.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini sangat diperhatikan untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah

manusia sehingga keabsahan data sangat diperlukan. Triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dengan sumber di luar data tersebut guna meningkatkan keabsahan dan validitas data. Triangulasi ini menjadi kunci dalam menjaga keabsahan data, di mana hasil wawancara mendalam dipadukan dengan data observasi langsung selama penelitian Musrenbang Desa serta dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti notulen rapat dan laporan kegiatan. Kombinasi metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih valid dan akurat, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Selain itu, bahan referensi digunakan sebagai alat pendukung untuk membuktikan dan memperkuat data yang diperoleh peneliti, sehingga meningkatkan kredibilitas temuan dalam penelitian ini.